

## Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Indonesia Sejak Pra-Kemerdekaan sampai Orde Baru

**Afifah Afra Aulia, Adjie Anggito Abhimanyu\*, Susiana Sofia Ranti, Widya Ajeng Prahesti**

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

\*abimadjiee1001@gmail.com

**Abstract:** Islamic education in Indonesia experienced dynamic development in response to the times. This research aims to describe the development of Islamic education in Indonesia since before the independence of the Republic of Indonesia until the New Order period. The research method used is a literature study. The results showed that Islamic education in Indonesia developed to answer the challenges of modernity to develop individuals. Despite challenges such as discrimination and religious diversity, the government has implemented policies to improve Islamic education and solve problems related to education. Globalisation has changed the direction and purpose of Islamic education, requiring critical thinking skills.

**Keyword:** Islamic education; madrasa; Indonesia; MAPK

**Abstrak:** Pendidikan Islam di Indonesia mengalami perkembangan dinamis dalam merespon perkembangan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia sampai pada masa Orde Baru. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia berkembang untuk menjawab tantangan modernitas untuk mengembangkan individu. Terlepas dari tantangan seperti diskriminasi dan keragaman agama, pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk meningkatkan pendidikan Islam dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan. Globalisasi telah mengubah arah dan tujuan pendidikan Islam, membuhkan kemampuan berpikir kritis.

**Kata kunci:** Pendidikan Islam; madrasah; Indonesia; MAPK

### A. Pendahuluan

Dalam pandangan Islam, pendidikan merupakan hal yang wajib diperoleh oleh manusia. Cakupan ajarannya meliputi ajaran-ajaran yang tergabung dalam akidah, ibadah, dan muamalah, yang mempengaruhi emosi, pikiran, dan tindakan seseorang, serta mengembangkan kepribadian. Sejarah awal masuknya Islam ke nusantara menjadi dasar bagi pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia berusaha untuk memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip Islam, terutama di era kerajaan. Pendidikan Islam selalu berkembang, dari sistem berbasis masjid hingga madrasah formal, termasuk kurikulum dan fitur kelembagaan baru untuk mengikuti perkembangan zaman. Pusat pendidikan Islam di masa klasik (masa Nabi Muhammad saw hingga Dinasti Abbasiyah)

selain masjid adalah rumah-rumah sahabat, setelah itu berkembang menjadi *kuttab*, *qushur* (pendidikan rendah di istana), toko-toko kitab, rumah-rumah para ulama, salon kesusasteraan, badiah, rumah sakit, dan perpustakaan.<sup>1</sup> Pendidikan Islam dipisahkan menjadi sistem formal dan informal, dengan kurikulum yang berbeda untuk madrasah formal dan pesantren. Sejarah Islam, yang membentang dari beberapa era, sangat terkait dengan sejarah pendidikan Islam. Pendidikan Islam pada era setelah kemerdekaan masih dianggap sering bertentangan dengan sistem pendidikan yang tumbuh dan berkembang secara terpisah satu sama lain.<sup>2</sup>

Namun pada kenyataannya, telaah historis menunjukkan bahwa tujuan pendidikan Islam bersifat dinamis dan sejalan dengan kemajuan masyarakat tempat pendidikan Islam dipraktikkan. Seperti halnya tujuan pendidikan masa Nabi Muhammad saw. dengan dinamika masyarakatnya yang sederhana berbeda jauh dengan tujuan pendidikan Islam abad IV Masehi apalagi pada abad modern saat ini.<sup>3</sup> Shihab menyatakan bahwa tujuan pendidikan menurut perspektif al-Quran adalah sebuah pembinaan terhadap manusia secara pribadi maupun kelompok. Melalui pendidikan tersebut manusia harus mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah swt. sekaligus sebagai khalifah di muka bumi, guna membangun dunia ini agar sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan oleh Allah. Pemikiran Islam mempelajari berbagai aspek, mulai dari sejarah, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya. Aspek-aspek ini merupakan faktor yang mempengaruhi ajaran Islam dan juga akan memberikan pengaruh terhadap pemikiran Islam itu sendiri, karena Islam selalu berkaitan dengan sejarah dan budaya yang ada di sekitarnya.<sup>4</sup>

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang selama 1400 tahun. Pendidikan Islam di Indonesia berasal dari abad ke-13 dan ke-17 Masehi dan merupakan bentuk pesantren. Syekh Maulana Malik mendirikan sistem pendidikan pesantren di Indonesia, yang telah berkembang dari waktu ke waktu. Karena sifat desentralisasi pendidikan, sekarang perlu untuk memeriksa preseden historis untuk menciptakan kebijakan yang efektif untuk memajukan pendidikan Islam di era kontemporer.<sup>5</sup>

Sejak orang-orang Venesia bernama Marcopolo mendarat di Perlak dan mayoritas penduduknya beragama Islam, Islam telah diperkenalkan ke Indonesia. Kedatangannya diperkirakan terkait dengan pelayaran dan perdagangan antara dunia Arab dan Asia Timur.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Sofanudin, A., Prihastuty, R., Hamzani, A.I., Khasanah, N. and Wibowo, A.M., 2022. Kuttab al-Fatih: New Phenomenon of Islamic Education Model in Indonesia. *Journal of Positive School Psychology*, 6(3), pp.1964-1975. Lahmi, A. and Ermawita, Y., 2022. Analysis of Islamic Education in the Era of Khulafa ar-Rashidin and Abbasid Dynasty. *Jurnal Islamika*, 5(1), pp.9-23.

<sup>2</sup> Daulay, H.P., Dahlan, Z., Priono, A. and Lubis, A.P., 2021. Kolonialisme dan Dikotomi Pendidikan di Indonesia. *Islamic Education*, 1(1), pp.1-10.

<sup>3</sup> Baedowi, M. and Chamadi, M.R., 2022. Manajemen pembelajaran Boarding School. *Jurnal Studi Islam Dan Kemuhammadiyah (JASIKA)*, 2(1).

<sup>4</sup> Musmuallim, M., Prasetiawan, A.Y. and Chamadi, M.R., 2021. Da'wah of Banyumas Islamic Chinese Ethnicity in the Development of Religious Moderation. *al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 6(2), pp.241-272.

<sup>5</sup> Mansyuri, A.H., Patrisia, B.A., Karimah, B., Sari, D.V.F. and Huda, W.N., 2023. Optimalisasi Peran Pesantren dalam Lembaga Pendidikan Islam di Era Modern. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), pp.101-112.

<sup>6</sup> Rosyada, D., 2014, April. Islamic education in Indonesia. In *Flinders University seminar on rumah budaya*, April.

Pendidikan Islam perlu dimodernisasi di lembaga pendidikan tinggi Indonesia untuk meningkatkan kondisi kehidupan dan menyelesaikan masalah-masalah sosial. Untuk mengatasi kepercayaan yang sudah ketinggalan zaman, diperlukan strategi pertumbuhan yang terfokus yang mencakup pendanaan inisiatif dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Untuk tetap mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembaruan dan penyesuaian kurikulum harus sering dilakukan.

Dari penjelasan tersebut, penulis mencoba untuk mengkaji sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Ditulisnya tema ini berdasarkan alasan penulis untuk menyajikan pengetahuan tentang perjalanan pendidikan Islam di Indonesia. Memahami sejarah pendidikan Islam sangat penting sebagai landasan bagi perkembangan kehidupan yang akan datang. Selain untuk pedoman hidup, pendidikan Islam ini juga berguna untuk mengatasi sikap terhadap kemajuan zaman.

## **B. Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia**

Indonesia telah menerima berita Islam sejak Marcopolo, kapal Venesia, singgah di Perlak. Meskipun tanggal pasti kedatangan Islam di Indonesia tidak diketahui, beberapa pihak berpendapat bahwa kedatangan Islam ada hubungannya dengan perdagangan dan pelayaran antara Asia Timur dan dunia Arab. Karena posisinya, Pulau Sumatera telah menjadi pusat perdagangan internasional sejak abad pertama Masehi. Fakta dan peristiwa yang berkaitan dengan komponen resmi dan informal tumbuh dan berkembangnya pendidikan Islam tercakup dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Perdagangan darat dan kekuatan militer adalah metode pertama yang digunakan Barat untuk menaklukkan dunia Timur selama Masa Kolonial Belanda. Dengan diperkenalkannya praktik-praktik dan prosedur-prosedur baru yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan negara yang ditaklukkan, Indonesia memulai proses westernisasinya. Istilah "westernisasi Kristenisasi" mengacu pada reformasi pendidikan yang melayani kebutuhan umat Kristen dan Barat.<sup>7</sup>

Pendidikan Dasar, Sekolah Latin, Seminarium Theologicum (Sekolah Seminari), Academie der Marine (Akademi Pelayaran), dan Sekolah Cina merupakan kerangka pendidikan pada era VOC. Masjid, musala, dan pesantren semuanya menawarkan pendidikan agama Islam; meskipun demikian, pemerintah Belanda menerapkan sejumlah undang-undang dan arahan untuk melanjutkan pendidikan Islam. Reformasi diperkenalkan di Indonesia pada awal abad ke-20, ketika para filsuf sekuler dan Islam mulai mempengaruhi pendidikan. Akibatnya, muncul pembaruan sumber daya dan teknik mengenai Islam, sehingga terjadi penggabungan pengetahuan umum dan agama.<sup>8</sup>

Pendidikan Islam di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia. Pendidikan Islam telah berkembang dari waktu ke waktu, dengan beberapa institusi yang berfokus pada struktur pesantren, sementara yang lain bertujuan untuk menyeimbangkan antara pengetahuan agama dan pengetahuan umum di madrasah. Meskipun terdapat kritik

---

<sup>7</sup> Aiwan, A. and Rehani, R., 2022. Kebijakan Pendidikan Islam Di Nusantara Sebelum Kemerdekaan: Kasus Kebijakan Politik Kolonial Jepang Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), pp.12037-12045.

<sup>8</sup> Nasir, M., 2018. Sejarah Lembaga Pendidikan Islam (Madrasah) Di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*. Safitri, L., 2017. Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia dan Australia. *JM (et. al), Islam Kontemporer di Indonesia dan Australia*, pp.394-407.

terhadap penghapusan nilai-nilai humanis, sebagian besar umat Islam memandang pendidikan agama sebagai studi rinci tentang ilmu-ilmu Islam. Madrasah terus menawarkan ilmu-ilmu agama, dengan pendidikan moral dan karakter yang masih menjadi perdebatan.

Sejarah pendidikan Islam di Indonesia sangat kompleks, dengan pesantren sebagai bentuk pendidikan yang diakui di nusantara. Pemerintah kolonial menggunakan sistem ini untuk memonopoli agama dan mengatasi masalah ketenagakerjaan. Namun, adopsi sistem pendidikan Islam berarti meningkatkan status dan martabat komunitas Muslim. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia mendirikan Kementerian Agama, yang mengawasi program pendidikan pemerintah dan mengadvokasi perluasan pendidikan Islam di Indonesia. Periode Orde Baru pemerintah Indonesia melihat pergeseran dari ideologi politik ke pendekatan pragmatis, yang menekankan pengembangan individu modern dengan minat pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada tahun 1975, sebuah keputusan mempertahankan madrasah dan menjadikan mata pelajaran ilmu pengetahuan umum sebagai bagian dari kurikulum untuk tujuh puluh persen mata pelajaran. Namun, hal ini menyebabkan berdirinya sekolah-sekolah prasekolah yang menjadi saingan utama madrasah.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 (1989) membagi Pendidikan Tinggi Islam ke dalam tingkatan yang lebih rendah dan mengubah madrasah menjadi sekolah, sehingga memungkinkan lebih banyak siswa yang memenuhi syarat untuk mendaftar di lembaga-lembaga Islam. Transisi dari IAIN ke UIN dan isu pendidikan telah berdampak pada kejelasan pendidikan Islam. Kapasitas Kementerian Agama berkurang karena konsep Orde Baru tentang pusat pendidikan satu atap, tetapi citra pendidikan Islam yang tidak jelas mungkin disebabkan oleh alokasi dan pengelolaan dana yang tidak tepat.<sup>9</sup>

Analisis SWOT (*strengths, weakness, opportunities, threats*) historis terhadap pendidikan Islam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan meliputi basis pendidikan komunitas Muslim, fokus pada pengembangan kekuatan nasional, dan legitimasi masyarakat. Peluang termasuk mengubah universitas menjadi komunitas Muslim, menjalin hubungan dengan penjajah, dan berbagi informasi keagamaan. Ancaman meliputi ketidaksetaraan sosial dan kemunduran lembaga-lembaga sebagai pusat pengajaran Islam.

Sistem pendidikan nasional Indonesia sangat dipengaruhi oleh pendidikan Islam, yang pada awalnya diajarkan dalam pola sekuler oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, model pendidikan agama tradisional diadopsi, dengan fokus pada lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren. Pemerintah Indonesia, di bawah bimbingan Christian Snouck Hurgronje, bertujuan untuk membatasi dampak Islam dan mengizinkan umat Islam untuk mempraktikkan keyakinan mereka di bawah pengawasan ketat.<sup>10</sup>

Kementerian Agama, yang didirikan pada tahun 1946, telah berperan penting dalam mengelola praktik-praktik keagamaan, menyelesaikan masalah-masalah pendidikan, dan menjaga stabilitas negara. Pada tahun 1946, sebuah peraturan dikeluarkan yang mewajibkan

---

<sup>9</sup> Hamka, H., 2009. Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum Pascapemerintahan Orde Baru. *HUNFA: Jurnal Studia Islamika*, 6(1), pp.69-92.

<sup>10</sup> Yuningsih, H., 2015. Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru. *Tasyri'*, 22(2), pp.175-194.

pelajaran agama untuk siswa kelas IV hingga VI, yang memungkinkan sekolah swasta untuk mengajarkan agama. Dewan Penasihat Pengajaran Islam didirikan pada tahun 1947 untuk mengatur pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri. Undang-Undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah dibuat pada tahun 1950 untuk membangun sistem pendidikan Islam di Indonesia. Kementerian Agama bertujuan untuk memajukan pendidikan agama di Indonesia, menyelesaikan masalah pendidikan, dan memastikan asimilasi kerangka kerja pendidikan Islam ke dalam kerangka kerja pendidikan negara secara keseluruhan.

Tugas Japenda pada tahun 1951 termasuk menulis buku-buku pelajaran untuk berbagai disiplin ilmu yang diajarkan di madrasah-madrasah dan meningkatkan pendidikan agama. Setelah Indonesia kembali ke pemerintahan kesatuan, UU No. 12/1954 diperkenalkan kembali ke DPR dan menjadi UU No. 1 pada tanggal 18 Maret 1954. Namun, partai-partai politik, terutama Masyumi, tidak puas dengan status pendidikan agama. Tap MPRS No. 2 tahun 1960 berusaha untuk memperkenalkan pendidikan agama di sekolah-sekolah, tetapi tidak menenangkan faksi-faksi politik. Program Pemerintah Orde Lama memperkenalkan pendidikan agama di seluruh Indonesia melalui Tap MPRS No. 2 tahun 1960. Era Orde Baru melihat kelompok baru siswa memberontak terhadap ketidakadilan dan keputusan yang sewenang-wenang. Pemerintah menerapkan kebijakan untuk meningkatkan standar pendidikan madrasah, Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri No. 03 Tahun 1975, yang mengakui tiga jenjang madrasah dan membentuk sistem pendidikan nasional yang integratif.<sup>11</sup>

Anggaran nasional sebesar 20% disisihkan untuk pendidikan selama era reformasi, yang mencakup gaji instruktur dan dosen, biaya operasional, bantuan keuangan untuk siswa dari latar belakang yang kurang mampu, pembelian buku gratis, infrastruktur, fasilitas, dan materi pembelajaran, serta pengembangan sumber daya manusia untuk lembaga pendidikan. Setiap anak Indonesia dijamin mendapatkan pendidikan minimal hingga mereka menyelesaikan sekolah menengah pertama, dan kebijakan sekolah gratis diterapkan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah. Standar internasional dan standar nasional diterapkan, dan kebijakan untuk sertifikasi guru dan dosen diterapkan untuk meningkatkan standar profesional pendidikan.

Arah dan tujuan pendidikan Islam telah berubah sebagai akibat dari globalisasi, dengan para pendidik dan pembuat kebijakan yang berkolaborasi untuk mengatasi isu-isu yang ditimbulkannya. Teknologi tinggi, fragmentasi politik, integrasi ekonomi, dan ketergantungan adalah hasil dari perubahan tersebut. Perdagangan terbuka merupakan hasil dari integrasi ekonomi, tetapi perlakuan yang adil dituntut oleh fragmentasi politik. Teknologi modern membuat tugas sehari-hari menjadi lebih mudah bagi manusia, tetapi juga mengubah cara berkomunikasi dan dapat disalahgunakan untuk tujuan-tujuan negatif. Saling mendominasi, atau kerja sama antar negara, adalah tanda umum dari saling ketergantungan.

Pendidikan Islam mempersiapkan siswa untuk menjadi manusia seutuhnya, baik secara intelektual maupun moral, dengan menekankan pengenalan akan Tuhan melalui iman dan takwa. Pendidikan Islam harus menggabungkan ilmu pengetahuan dan agama untuk

---

<sup>11</sup> Akhyar, Y., Pembinaan dan Peningkatan Mutu Madrasah Ditinjau dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Ilmiah Keislaman*, 10(1), pp.47-48.



memenuhi peran sebagai *khalifah fil ardh*, pemimpin di bumi. Untuk menjaga kesinambungan dan menghindari sekularisme dalam pengetahuan, paradigma seperti Islamisasi ilmu pengetahuan dan saintifikasi Islam berusaha untuk mengintegrasikan kembali teks dengan konteks di sekitarnya.<sup>12</sup>

Guru sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan, tetapi kesucian dan fungsi mereka sebagai katalisator, mediator, dan fasilitator telah dirusak oleh perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Prinsip-prinsip moral Islam, seperti *adl* (keadilan), *ihsan* (berbuat baik), dan *taqwa* (merasakan kehadiran Tuhan yang melahirkan kepatuhan terhadap hukum dan larangan-Nya), harus ditanamkan dan direalisasikan dalam pendidikan Islam untuk mengatasi hal ini. Hal tersebut sangat penting bahwa ilmu pengetahuan dan agama diintegrasikan ke dalam pendidikan Islam untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan mempersiapkan generasi penerus untuk menghadapi masalah-masalah yang muncul akibat globalisasi.

Penjajahan Belanda di Indonesia bertujuan untuk melakukan imperialisasi dan dakwah, maka berdampak luar biasa terhadap pendidikan Islam. Pemerintah Belanda secara aktif mempromosikan sekularisme dan agama Kristen di seluruh negeri sambil mengontrol pendidikan Islam dengan ketat. Pesantren menggunakan alat pendidikan kolonial, seperti pembagian kelas dan model halaqah, untuk bersaing dengan mereka. Meskipun demikian, perspektif sekuler pemerintah Belanda terhadap pendidikan Islam mempengaruhi strategi ini. Tujuan sistem pendidikan Belanda yang menggunakan sekolah-sekolah kolonial untuk menyamakan kapasitas penduduk asli, membingungkan pendidikan Islam sejak masa penjajahan Belanda hingga tahun 1965. Hal ini mengakibatkan konsentrasi pada ilmu pengetahuan dan agama serta diskriminasi antara pejabat dan generasi muda. kelas sosial yang lebih rendah. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia tetap bertahan meski terdapat undang-undang yang diskriminatif.

Setelah kepergian Belanda, Jepang menaklukkan Indonesia, menunjukkan sikap lunak terhadap pendidikan Islam. Akibat kuatnya pengaruh militerisme dan indoktrinasi, pendidikan di Indonesia mengalami kemunduran akibat penindasan Jepang terhadap warga negaranya pada Perang Dunia II. Di Indonesia, pendidikan Islam diwujudkan melalui “Sekolah Kolonial” dan “Pesantren” pada masa penjajahan. Dualitas ini tetap berlaku hingga Indonesia merdeka, dan pada saat itu Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama mengawasi pendidikan. Madrasah swasta awal diawasi oleh Kementerian Agama dan dipisahkan menjadi program Madrasah Lanjutan tiga tahun dan program Sekolah Menengah Islam (Tingkat Rendah) empat tahun. Pemerintah Indonesia menyesuaikan kurikulum dari yang sepenuhnya religius menjadi 70% umum dan 30% religius pada awal kemerdekaan. Meskipun pendekatan ini menempatkan madrasah setara dengan sekolah biasa, pendekatan ini juga menimbulkan protes umat Islam. Pada tahun 1959, pemerintah memilih untuk mensubsidi berbagai sekolah asrama Islam, meskipun pemerintah Orde Lama tetap memberikan dukungan materi kepada lembaga pendidikan Islam.

---

<sup>12</sup> Nasution, Z., 2019. Dasar Dan Tujuan Pendidikan Islam Dalam Konsep Alquran. *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 9(2). Rohman, A. and Puspitasari, E., 2011. Hukum Toleransi Kelompok Salafi Terhadap Kelompok Islam Lainnya di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), pp.377-388.

Pemerintah menyarankan untuk mengubah pesantren konvensional menjadi madrasah dan menggunakan kurikulum pesantren dengan rutin menambahkan mata pelajaran umum sebagai renungan. Meski demikian, protes tetap terjadi karena pesantren merupakan lembaga otonom yang menolak kendali pemerintah. Departemen Agama didirikan pada tahun 1946, menandai awal tumbuhnya pendidikan Islam di Indonesia. Undang-Undang Pendidikan Nomor 4 dan Undang-Undang Pendidikan Tahun 1954 Nomor 20 menetapkan peraturan tentang pendidikan agama di sekolah umum pada tahun 1950. Kementerian Agama bertugas menangani permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan di sekolah umum, pesantren, dan madrasah. Badan Pendidikan Keagamaan didirikan oleh pemerintah pada tahun 1950 untuk mengawasi madrasah dan meningkatkan standar pengajarannya. Pada tahun 1960, Sidang MPRS menetapkan bahwa pendidikan agama harus diberikan di perguruan tinggi negeri; Namun, pada tahun 1967, persyaratan tersebut diubah untuk mewajibkan kursus agama dan visi bagi siswa.

Pemerintah menaikkan status madrasah dari swasta menjadi negeri dalam upaya meningkatkan standar pengajarannya. Pesantren ditawarkan kesempatan untuk menjadi negara dan bukan madrasah, namun beberapa di antara mereka menolak opsi tersebut. Dalam rangka mendidik siswa untuk hidup mandiri dan penghidupan di bidang ekonomi, industri, dan transmigrasi, Departemen Agama pada tahun 1950 menerapkan “Wajib Belajar” selama delapan tahun di semua sekolah, termasuk madrasah. Untuk menjamin pengajaran agama Islam diajarkan minimal enam jam per minggu, pemerintah mengambil kebijakan yang mewajibkan madrasah yang terakreditasi harus mendaftar ke Kementerian Agama. Sejak terbitnya Ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966, pemerintah Orde Baru sangat serius dalam mengawasi perkembangan pendidikan Islam. Maklumat ini bertujuan untuk memperkuat pengajaran agama di sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi, menekankan peran agama Soko Guru dalam pembentukan karakter bangsa.

Untuk menyamakan ijazah madrasah dengan ijazah sekolah negeri, pemerintah mengeluarkan SKB (Surat Keputusan Bersama) kepada Tiga Menteri pada tahun 1975. Hal ini memperbolehkan lulusan melanjutkan pendidikan di sekolah negeri dan siswa madrasah dipindahkan ke sekolah negeri yang setara. Program Madrasah Aliyah Khusus (MAPK) didirikan pada tahun 1987 dengan tujuan untuk mencetak para ulama muda yang memiliki kemampuan berbahasa Arab dan Inggris serta memiliki pemahaman yang kuat tentang pengetahuan umum dan agama. Pemerintah merancang undang-undang pada tahun 1989 yang menjelaskan bahwa madrasah setara dengan sekolah negeri, sehingga menyebabkan lebih banyak beban kerja dan komitmen waktu. Kurikulum 1994 menggantikan kurikulum 1984, dan pemerintahan Orde Baru terus menyamakan dan mengadaptasi madrasah dengan sekolah negeri sementara.

### **C. Simpulan**

Pendidikan Islam memiliki sejarah panjang di Indonesia. Karena beberapa lembaga berkonsentrasi pada struktur pelatihan dan lembaga lainnya menyeimbangkan pengetahuan agama dan pengetahuan umum di madrasah, sistem ini telah berubah seiring berjalannya waktu. Mayoritas umat Islam memandang pendidikan agama sebagai kajian menyeluruh terhadap ilmu-ilmu keislaman, meski tuduhan bahwa prinsip-prinsip humanis sudah dihapuskan. Ketika mendirikan Kementerian Agama pada tahun 1946, pemerintah Indonesia

bertujuan untuk mengawasi inisiatif pendidikan pemerintah dan mendorong pertumbuhan pendidikan Islam. Di bawah pemerintahan Orde Baru, filsafat politik digantikan oleh strategi praktis yang menekankan pada membesarkan masyarakat kontemporer yang tertarik pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Madrasah dipertahankan berdasarkan perintah tahun 1975, yang juga memasukkan kursus ilmiah umum dalam kurikulum untuk tujuh puluh persen topik. Madrasah diubah menjadi sekolah, dan pendidikan tinggi Islam dipecah menjadi beberapa tingkatan yang lebih rendah berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989. Sejak didirikan pada tahun 1946. Globalisasi telah mengubah arah dan tujuan pendidikan Islam, dimana para ulama dan pengambil keputusan berkolaborasi untuk mengatasi permasalahan termasuk teknologi maju, perpecahan politik, integrasi ekonomi, dan ketergantungan. Kesimpulannya, sangat penting untuk memasukkan ilmu pengetahuan dan agama ke dalam pendidikan Islam untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan membekali generasi berikutnya untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aiwan, A. and Rehani, R., 'Kebijakan Pendidikan Islam Di Nusantara Sebelum Kemerdekaan: Kasus Kebijakan Politik Kolonial Jepang Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4.6 (2022), pp.12037-12045.
- Akhyar, Y., 'Pembinaan dan Peningkatan Mutu Madrasah Ditinjau dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional', *Jurnal Ilmiah Keislaman*, 10.1 (2011), pp.47-48.
- Baedowi, M. and Chamadi, M.R., 'Manajemen pembelajaran Boarding School,' *Jurnal Studi Islam Dan Kemuhammadiyah (JASIKA)*, 2.1 (2022).
- Daulay, H.P., Dahlan, Z., Priono, A. and Lubis, A.P., 'Kolonialisme dan Dikotomi Pendidikan di Indonesia', *Islamic Education*, 1.1 (2021), pp.1-10.
- Hamka, H., 'Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum Pascapemerintahan Orde Baru,' *HUNAF: Jurnal Studia Islamika*, 6.1 (2009), pp. 69-92.
- Lahmi, A. and Ermawita, Y., 'Analysis of Islamic Education in the Era of Khulafa ar-Rashidin and Abbasid Dinasty', *Jurnal Islamika*, 5.1 (2022), pp. 9-23.
- Mansyuri, A.H., Patrisia, B.A., Karimah, B., Sari, D.V.F. and Huda, W.N., 'Optimalisasi Peran Pesantren dalam Lembaga Pendidikan Islam di Era Modern', *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 4.1 (2023), pp. 101-112.
- Musmuallim, M., Prasetiawan, A.Y. and Chamadi, M.R., 'Da'wah of Banyumas Islamic Chinese Ethnicity in the Development of Religious Moderation', *al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 6.2 (2021), pp. 241-272.
- Nasir, M., 'Sejarah Lembaga Pendidikan Islam (Madrasah) di Indonesia', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 11.24 (2018).
- Nasution, Z., 'Dasar Dan Tujuan Pendidikan Islam Dalam Konsep Alquran', *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 9.2 (2019).
- Rohman, A. and Puspitasari, E., 'Hukum Toleransi Kelompok Salafi Terhadap Kelompok Islam Lainnya di Kabupaten Banyumas', *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.3 (2011), pp.



377-388.

Rosyada, D., 'Islamic education in Indonesia', in *Flinders University seminar on rumah budaya, April* (2014).

Safitri, L., 'Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia dan Australia', in *Islam Kontemporer di Indonesia dan Australia*, ed by Makruf J (Jakarta: PPIM UIN Jakarta dan Australia Global Alumni, 2017), pp. 394-407.

Sofanudin, A., Prihastuty, R., Hamzani, A.I., Khasanah, N. and Wibowo, A.M., 'Kuttab al-Fatih: New Phenomenon of Islamic Education Model in Indonesia', *Journal of Positive School Psychology*, 6.3 (2022), pp. 1964-1975.

Yuningsih, H., 'Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru', *Tasyri'*, 22.2 (2015), pp.175-194.